



RENJA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Veteran No. 37 Lamongan, 62212

Telp. (0322) 3326400 , Fax. (0322) 3326400

E-Mail : dinpppa@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/11/KEP /413. 115/2022

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusun Renja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 33).
30. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/245/KEP/413.013/2022 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/11/KEP /413.115 /2022
Tanggal : 28 Juli 2022

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penanggung Jawab | ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si | Plt. Kepala Dinas |
| 2 | Ketua | ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si | Sekretaris Dinas |
| 3 | Sekretaris | RUJU LUSTAMADJI, SE | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan |
| 4 | Anggota | IDA FOURTH HANDOKO, S.P | Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data |
| | | DJUWARI, SKM. MM.Kes | Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | | RITTA HILALLIYAH, SH.MM | Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | BUDIHARJO, SE | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| | | Dra. SITI MAYSAROH, MM | Analisis Kebijakan |
| | | TITI RISAHONDUA, S.Sos | Analisis Kebijakan |
| | | Drs. SUDIYONO | Analisis Kebijakan |
| | | JUWADI, SE | Analisis Kebijakan |
| | | SUPARKAN, SH | Analisis Kebijakan |
| | | SUSILO HERI PURWATI, SE | Analisis Kebijakan |
| | | MASRUROH, SH.MM | Analisis Kebijakan |
| | | BUDI WIGNYO SISWOYO, S.KEP, NS | Kasi Pengarusutamaan Hak Anak |
| | | SRI HARTINI, S.K.M | Kasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak |
| AGUSTINA SUBIYAKTI, SE | Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|----|----------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | AHMAD MUNIR SAHLANI, SE | Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan |
| | | ANITA NURAINI DYAH WIDAYANTI, S.Pd | Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan |

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SUL STYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat hidayah dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Lamongan, 28 Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710722 199203 2 005

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | 1 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 5 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 6 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 7 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | 7 |
| 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | 54 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD | 55 |
| 2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 82 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..... | 83 |
| 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI | 83 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH | 85 |
| 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... | 87 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 70 |
| BAB V PENUTUP | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 8 |
| TABEL 2.1 T-C.29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 KABUPATEN LAMONGAN | 8 |
| TABEL 2.2 T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN..... | 53 |
| TABEL 2.4 (T-C.31) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KABUPATEN LAMONGAN..... | 57 |
| TABEL 2.5 T-C.32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN LAMONGAN | 62 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 83 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 91 |
| TABEL 4.1 T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024..... | 91 |
| BAB V PENUTUP | 84 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) adalah dokumen perencanaan tahunan pada level perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2023, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950,

- tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 33).
30. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/245/KEP/413.013/2022 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah :

- Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023;

- Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023;
- Renja ini bertujuan memberikan arah kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2021 anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 4.184.262.759,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 (enam) program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.853.765.348,- atau sebesar 92,10 %. Sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 330.497.411,- atau 7,90 %, dikarenakan adanya perbandingan yang sangat signifikan antara Pendapatan Daerah dengan pengeluaran, sehingga dilakukan efisiensi anggaran. Disamping itu juga tidak terserapnya semua anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena anggaran akomodasi penginapan tidak terserap mengingat lokasi tempat tinggal korban sangat dekat sehingga memilih pulang ke rumah.

Capaian kinerja pada Tahun 2022 sudah sesuai dengan target sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2022 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1 T- C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lamongan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100% | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perkantoran | | 346 Surat | | | | | | |
| | | | | 5 Rekening | | | | | | |
| | | Jumlah rekening yang terbayar | | | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Jumlah pemenuhan service komputer dan TV | | 20 Unit | | | | | | |
| | | Jumlah Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | 8 Unit | | | | | | |
| | | Jumlah tenaga administrasi / teknis kegiatan yang terbayar | | 15 Orang | | | | | | |
| | | Jumlah tenaga jasa pelayanan kantor | | 4 Orang | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Barang pakai habis perkantoran | Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor | | 25 Jenis | | |
| | | | | | | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor | | 10 Jenis | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Jumlah pemenuhan peralatan kebersihan | | 10 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah pemenuhan bahan bacaan surat kabar | | 3 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan | | 5 Jenis Cetakan dan Fotocopy 34.184 Lembar | | | | | | |
| | | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | | 422 Snack box, 422 Nasi box, 32 Dus air mineral | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 2 1 3 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | 5 Kali | | | | | | |
| 2 2 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | | 100 % | | | | | | |
| 2 2 2 3 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor | Jumlah Pengadaan perlengkapan dan Peralatan Kantor | | 2 Unit Ac split 1 Pk, 3 Unit AC split 1,5 pk, 3 Unit AC 2 pk, 2 Unit almari kayu, 4 Unit computer /pc, 4 Unit | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | | | printer A4, 2 unit tempat tidur, 2 Unit almari kantor, 1 Set cctv | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 1 Gedung | | | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 2 Jenis | | | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | | Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor | 1 Gedung | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 2 2 7 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/ Operasional | | 4 unit sepeda motor 4 Unit mobil | | | | | | |
| 2 2 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu | | 100% | | | | | | |
| 2 2 6 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Secara Berkala | | 5 Dokumen | | | | | | |
| 2 2 6 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi | | 5 Dokumen | | | | | | |
| 2 2 1 5 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan | | 55,89 % | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 2 1 0 5 0 1 | Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak | Jumlah Lembaga Pendidikan yang mengikuti sosialisasi sekolah ramah anak | | 60 Orang | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kabupaten layak anak | | 55 Orang | | | | | | |
| 2 2 1 0 5 0 2 | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PPRG | | 144 Orang | | | | | | |
| 2 2 1 0 5 0 3 | Pengembangan Sistem Data dan Informasi PUG dan Anak | Jumlah Dokumen profil anak | | 1 Dokumen | | | | | | |
| 2 2 1 3 6 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | | 37,50 % | | | | | | |
| | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | | 83,33 % | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 2 1 0 6 0 2 | Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) | Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta operasional Rumah Aman dan P2TP2A | | 7 Pendamping dan 1 Orang Fulltimer | | | | | | |
| 2 2 1 0 6 0 3 | Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengaruh Globalisasi ICT (Information Communication And Technology) | | 80 Peserta | | | | | | |
| 2 2 1 7 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Prosentase jumlah perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Politik | | 0,24 % | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 2 1 2 | Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kualitas hidup lansia | | 75 Peserta | | | | | | |
| 2 2 1 3 | Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga muda dalam pengasuhan balita | | 60 Ibu Muda (Keluarga Muda) | | | | | | |
| 2 2 1 6 | Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif | Jumlah perempuan pekerja rumahan yang mendapat pembinaan pengelolaan usaha | | 75 Perempuan Pekerja Rumahan | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 20081 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| | | Persentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| 20081201 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % | | | |
| 2008120101 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | | | |
| 200202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % | | | |
| 200201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | | | |
| 200205 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | | | |
| 200207 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | | | |
| 200206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 13 Jenis | 13 Jenis | 100 % | | | |
| 200203 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga | | | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 % | | | |
| 200204 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Pemenuhan bahan logistik kantor | | | 25 Jenis | 25 Jenis | 100 % | | | |
| 200205 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Pemenuhan Cetak dan Penggandaan | | | 5 Jenis Cetak dan 65.000 Lembar Fotocopy | 5 Jenis Cetak dan 38.936 Lembar Fotocopy | 99,99 % | | | |
| 200206 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | 08169 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 330 Nasi Box dan 330 Snack Box | 229 Nasi Box dan 229 Snack Box | 89,36 % | | | |
| | | Jumlah Pemenuhan Makan dan Minum Rapat Yang tersedia | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi ke luar daerah | | | 4 Kali | 4 Kali | 100 % | | | |
| 200200 | 0818 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| | | Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik | | | | | | | | |
| 200200 | 08182 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 5 Rekening | 5 Rekening | 100 % | | | |
| | | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | | | | |
| 200200 | 08183 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 15 Unit | 15 Unit | 100 % | | | |
| | | Jumlah Pemenuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| 200200 | 08184 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 23 Orang | 23 Orang | 100 % | | | |
| | | Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| 200200 | 0819 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100% | 100% | 100 % | | | |
| | | Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan kondisi baik | | | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2 Unit Mobil | 2 Unit Mobil | 100 % | | | |
| 200202 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 100 % | | | |
| 200206 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | 11 unit | 11 unit | 100 % | | | |
| 200209 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1 Gedung | 1 Gedung | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|----------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2002 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Jumlah Perempuan Produktif yang peran Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) | | | 0,72% | 0,72% | 100 % | | | |
| 200201 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG | | | 88 Peserta | 88 Peserta | 100 % | | | |
| 20020104 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Perencanaan APE | | | 36 Peserta | 36 Peserta | 100 % | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Fasilitasi PUG | | | 52 Peserta | 52 Peserta | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200202 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | 22 peserta | 22 peserta | 100 % | | | |
| 200201 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan Pekerja Rumahan | | | 22 Perempuan Pekerja Rumahan | 22 Perempuan Pekerja Rumahan | 100 % | | | |
| 008203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase tercapainya penguatan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan perempuan | | | 6,28% | 6,28% | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan penerima buku KIE | | | 510 Buku/Lem bage | 510 Buku/Lem bage | 100 % | | | |
| 20085 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase tersedianya data Profil gender dan anak | | | 20% | 20% | 100 % | | | |
| 20085 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak | | | 100 % | 100 % | 100 % | | | |
| 20085 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Profil Gender dan Profil Anak Yang dibuat | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | | | |
| 20086 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase tercapainya Pemenuhan Hak Anak | | | 3,16% | 3,16% | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200201 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA | | | 0,67% | 0,67% | 100 % | | | |
| 2002011 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi KLA | | | 55 Peserta | 55 Peserta | 100 % | | | |
| | | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Sekolah Ramah Anak | | | 27 Peserta | 27 Peserta | 100 % | | | |
| 200202 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga penyedia layanan kualitas hidup Anak dalam PHA | | | 0,60% | 0,60% | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|----------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 20020086 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Internet Kreatif | | | 30 Peserta | 30 Peserta | 100 % | | | |
| 20020086 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Forum Anak yang dibentuk/dibina | | | 3 pembentuk | 18 Pembentuk/Pembinaan | 100 % | | | |
| 200803 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | | | 35% | 60% | 171,43 % | | | |
| 200803 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | | 100% | 100% | 100 % | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | | | 40 Peserta | 40 Peserta | 100 % | | | |
| 200202 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | | | 35 % | 60% | 171,43 % | | | |
| 200201 | Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | | | 6 | 9 | 150 % | | | |
| 20087 | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 45% | | 45% | 55,56% | 123,47% | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200201 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan | 43,21% | | 43,21% | 43,21% | 100 % | | | |
| 200202 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Layanan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan | 70 Orang | | 70 Orang | 70 Orang | 100 % | | | |
| 200202 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan | | | 45% | 55,56% | 123,47% | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota. | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan | | | 12 Kasus | 21 Kasus | 175 % | | | |
| 200203 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengaruh Globalisasi ICT (Information Communication And Technology) | | | 21 Orang | 21 Orang | 100 % | | | |
| 20081 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Nilai IKM Perangkat Daerah | 81,5 | | | | | 79,5 | | |
| 20081 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen | | | | | 5 Dokumen | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 0 0 2 0 0 8 1 1 1 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | | | | | 2 Dokumen | | |
| 2 0 0 2 0 0 8 1 1 7 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 Dokumen | | | | | 3 Dokumen | | |
| 2 0 0 2 0 8 1 2 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | | | | | 5 Dokumen | | |
| 2 0 0 2 0 0 8 1 2 1 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 0 0 2 0 0 8 1 2 5 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen | | | | | 2 Dokumen | | |
| 2 0 0 2 0 0 8 1 2 7 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Dokumen | | | | | 2 Dokumen | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200205 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | | | | | 100% | | |
| 2002059 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 4 Kegiatan | | | | | 2 Kegiatan | | |
| 200206 | Administrasi umum perangkat daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | | | | | 100% | | |
| 2002061 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 Jenis | | | | | 11 Jenis | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | 20063 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | | | | 12 Jenis | | |
| 20081 | 20064 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis | | | | 30 Jenis | | |
| 20081 | 20065 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 45100 Lembar Fotocopy | | | | 5 Jenis Cetakan 57340 Lembar Fotocopy | | |
| 20081 | 20066 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis | | | | 3 Jenis | | |
| 20081 | 20069 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 428 Nasi Box dan 428 Snack Box | | | | 428 Nasi Box dan 428 Snack Box | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|---------|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Kali | | | | | 12 Kali | | |
| 200207 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | | | | | 100% | | |
| 2002075 | Pengadaan mebel | Jumlah pemenuhan mebel | 3 Unit Almari Arsip, 3 Unit Filling Cabinet | | | | | 4 Unit Filling Cabinet | | |
| 2002076 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya | 2 unit Layar LCD, 2 unit LCD Proyektor, 3 Unit Notebook | | | | | 1 Set CCTV, 5 Unit Notebook /Laptop, 3 Unit LCD, 1 Unit Layar | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|-----------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | | | | | | | LCD Proyektor | | |
| 2080208 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | | | | | 100% | | |
| 208020802 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening | | | | | 5 Rekening | | |
| 208020803 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Unit | | | | | 5 Unit | | |
| 208020804 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 Orang | | | | | 23 orang | | |
| 2080209 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | | | | | 100% | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | 20091 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 2 Unit Mobil | | | | 2 Unit Mobil | | |
| 200200 | 20092 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | | | | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | | |
| 200200 | 20096 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit | | | | 5 Unit | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 Gedung | | | | | 1 Gedung | | |
| 2002 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; | Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik); | 5,25% | | | | | 4.25% | | |
| 200201 | Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 88 Peserta | | | | | 103 Peserta | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 36 Peserta x 2 Kegiatan | | | | | 63 Peserta x 2 kegiatan | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 52 Peserta x 1 Kegiatan | | | | | 40 Peserta | | |
| 200200 | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 75 Peserta | | | | | 92Peserta | | |
| 200200 | Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 40 Perempuan Pekerja Rumahan | | | | | 92 Perempuan Pekerja Rumahan | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam musrenbang | 35 Perempuan | | | | | | | |
| | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | 570 lembaga | | | | | | | |
| | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan | 60 orang anggota organisasi perempuan yang mengikuti pembinaan | | | | | | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|----------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah buku KIE yang diberikan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | 510 Buku/Lem baga | | | | | | | |
| 20084 | Program peningkatan kualitas keluarga | Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga | 80,00% | | | | | 72,00% | | |
| 20084201 | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah keluarga yang dibina | 850 keluarga | | | | | 80 keluarga | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2002008413 | Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita | 850 Peserta | | | | | 80 Peserta | | |
| 20085 | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | Persentase tersedianya data profil gender dan anak | 100% | | | | | 40% | | |
| 200200851 | Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 data | | | | | 34 data | | |
| 2008511 | Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen | | | | | 2 Dokumen | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak dan profil gender tingkat kecamatan | 69 Peserta x 2 kegiatan | | | | | | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | | | | | | 33 Peserta | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | | | | | | 33 Peserta | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|-----------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 20086 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase forum anak yang terbentuk | 21,10% | | | | | 12,66% | | |
| 20086201 | Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 54 Satuan Pendidikan | | | | | 67 Satuan Pendidikan | | |
| 200862010 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta | | | | | 120 Peserta | | |
| | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 54 Peserta | | | | | 67 Peserta | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 20020 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 lembaga | | | | | 35 Lembaga | | |
| 200204 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 30 pembentuk an/pembin aan | | | | | 18 Pembentuk an | | |
| | | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta | | | | | 35 Peserta x 2 kegiatan | | |
| 2003 | Program perlindungan perempuan | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 45% | | | | | 37% | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200201 | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga | | | | | 7 Lembaga | | |
| 200201 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 60 Peserta | | | | | 27 Peserta | | |
| 200202 | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 6 Kasus | | | | | 6 Kasus | | |
| 200202 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi | 6 kasus | | | | | 6 kasus | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|----------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200203 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga | 7 Lembaga | | | | | 7 Lembaga | | |
| 20020302 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 100 peserta | | | | | 60 peserta | | |
| 20087 | Program perlindungan khusus anak | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 70% | | | | | 50% | | |
| 200871 | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 43,21% | | | | | 12,35% | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|--------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 200200 | Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 70 Peserta | | | | | 20 Peserta | | |
| 200202 | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 12 Kasus | | | | | 12 Kasus | | |
| 200202 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 12 Kasus | | | | | 12 Kasus | | |

RENJA TAHUN 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022 | |
|----------|--|--|---|---|--|---|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 20020087 | Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak | 50 Peserta (unsur Siswa SMP/MTs, SMA/MA) | | | | | 45 peserta (unsur Siswa SMP/mts, SMA/MA) | | |
| 20020087 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 5,80% | | | | | 4,22% | | |
| 20020087 | Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis msyrakt. | 55 Peserta (relawan PATBM Tingkat Desa/Kelurahan) | | | | | 40 peserta relawan PATBM desa keluarahan | | |

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 6 program, dimana di dalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - c. Program Perlindungan Perempuan
 - d. Program Pengelolaan Sisten data Gender dan Anak
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kegiatan yang terdiri dari 5kegiatan pendukung dan 10 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan secara kuantitatif yaitu didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi atas dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.2 T - C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKU | Target Renstra Perangkat Daerah | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|-----------|----------------------|---|---------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | - | - | % Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 81,58 % | 73,97 % | 73,99 % | - | - | - | - |
| 2. | - | - | % Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) | - | 65,37 % | 65,57 % | - | - | - | - |
| 3. | - | - | % Pemenuhan hak anak | - | 12,66 % | 14,77 % | - | - | - | - |
| 4. | - | - | % Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 35 % | 37 % | 39 % | 60 % | - | - | - |
| 5. | - | - | % Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 45 % | 50 % | 55 % | 55,56 % | - | - | - |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari Tabel 2.1 T-C.29 dan 2.2 T-C.30 dapat diketahui bahwa pada Rencana Kerja 2021 yang sudah dilaksanakan baik program maupun kegiatan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi kegiatan dan capaian kinerja, dapat diketahui bahwa pada indikator-indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sudah berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meskipun demikian, terdapat hal kritis dalam pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pemutakhiran data di profil gender dan anak belum sempurna.

2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan APE belum optimal karena terjadi regenerasi pada pegawai OPD terkait.
- b. Kurangnya volume dan cakupan kegiatan advokasi dan fasilitasi.
- c. Cakupan peserta yang diundang masih belum maksimal.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tidak dapat dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi atau pertemuan kelompok, karena pandemi covid 19 masih berlangsung.
- e. Peserta dari P2TP2A kecamatan yang dapat diundang masih terbatas.
- f. Anggaran sewa hotel yang diperuntukkan kepada korban dan pendamping (keluarga korban) tidak bisa diserap dikarenakan korban dan pendamping tidak mau menggunakan fasilitas / ingin pulang kerumah.
- g. Adanya PPKM darurat dan beberapa pegawai terinveksi covid 19 sehingga realisasi terhambat karena pendampingan tertunda.
- h. Beberapa korban, khususnya perempuan tidak bersedia untuk dikunjungi sehingga penyerapan anggaran untuk kunjungan tidak maksimal.

- i. Belum terinventarisir data terkait urusan pemberdayaan perempuan dan anak.
- j. Sistem data masih digabung dengan salah satu bidang. Tidak berdiri sendiri sehingga menghambat pencapaian kinerja pada system data.
- k. Kurangnya koordinasi / kerjasama lintas sektoral dalam hal pembuatan dokumen profil anak dan gender kabupaten lamongan.
- l. Pelaksanaan kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten /kota belum maksimal di karenakan pandemi covid 19.
- m. Tidak bisa menjangkau seluruh perwakilan PATBM Desa/Kelurahan di Lamongan.
- n. Belum adanya PKS (Perjanjian Kerjasama) antar OPD utama dan pendukung dalam pembuatan dokumen profil gender dan anak.

3. Dampak

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan dan capaian dari program dan kegiatan. Hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap kurang optimalnya pencapaian dan kinerja yang hendak diwujudkan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tercantum program - program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah kabupaten dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program - program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kabupaten.

Program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 2.3 T - C.31
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Lamongan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pagu : 4.455.034.800

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| N O | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,5 | 3.851.284.800 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | Nilai IKM Perangkat Daerah | 79,5 | 3.851.284.800 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen | 26.300.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja | 5 Dokumen | 26.300.000 | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dokumen | 13.000.000 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dokumen | 13.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | Daerah | | | | | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 dokumen | 13.300.000 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | | Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah | 3 dokumen | 13.300.000 | |
| | Administrasi keuangan perangkat daerah | | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | 2.750.228.800 | Administrasi keuangan perangkat daerah | | Jumlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | 2.750.228.800 | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen | 2.723.928.800 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 1 Dokumen | 2.723.928.800 | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen | 13.000.000 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 2 Dokumen | 13.000.000 | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | 2 Dokumen | 13.300.000 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan | | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Dokumen | 13.300.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | mesteran SKPD | | SKPD | | | bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | | | | | |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | 27.500.000 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | 27.500.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 2 Kegiatan | 27.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 2 Kegiatan | 27.500.000 | |
| | Administrasi umum perangkat daerah | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 146.200.000 | Administrasi umum perangkat daerah | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 146.200.000 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jumlah pemenuhan komponen instalasi | 11 Jenis | 16.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang | | Jumlah pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 11 Jenis | 16.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|---|-----------------------------|---|--------|--|---|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | listrik/penerangan bangunan kantor | | | an bangunan kantor | | | | | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | 18.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | 18.000.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis | 30.000.000 | Penyediaan bahan logistik kantor | | Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor | 30 Jenis | 30.000.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 57340 Lembar Fotocopy | 25.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan | 5 Jenis Cetakan 57340 Lembar Fotocopy | 25.000.000 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis | 7.200.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | | Jumlah pemenuhan bahan bacaan | 3 Jenis | 7.200.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 428 Nasi Box dan 428 Snack Box | 23.600.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia | 428 Nasi Box dan 428 Snack Box | 23.600.000 | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Kali | 26.400.000 | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 12 Kali | 26.400.000 | |
| | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 95.000.000 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 95.000.000 | |
| | Pengadaan mebel | | Jumlah pemenuhan mebel | 4 Unit Filling Cabinet | 25.000.000 | Pengadaan mebel | | Jumlah pemenuhan mebel | 4 Unit Filling Cabinet | 25.000.000 | |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah pemenuhan peralatan dan | 1 Set CCTV, 5 Unit | 70.000.000 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya | 1 Set CCTV, 5 Unit | 70.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|--|-----------------------------|---|--------|--|---|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | mesin lainnya | Notebook/Laptop , 3 Unit LCD , 1 Unit Layar LCD Proyektor | | | | | Notebook /Laptop , 3 Unit LCD , 1 Unit Layar LCD Proyektor | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 597.656.000 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 597.656.000 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening | 100.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 5 Rekening | 100.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Unit | 7.000.000 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Unit | 7.000.000 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 orang | 490.656.000 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor | 23 orang | 490.656.000 | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 208.400.000 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 208.400.000 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan | 2 Unit Mobil | 43.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas | 2 Unit Mobil | 43.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | jabatan | | perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | | kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | jabatan | | | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 25.400.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor | 25.400.000 | |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit | 5.000.000 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit | 5.000.000 | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor | | Jumlah pemeliharaan/reh | 1 Gedung | 135.000.000 | Pemeliharaan/r rehabilitasi | | Jumlah pemeliharaan/rehabilit | 1 Gedung | 135.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | dan bangunan lainnya | | abilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | | gedung kantor dan bangunan lainnya | | asi gedung kantor dan bangunan lainnya | | | |
| | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; | | Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik); | 4.25% | 135.380.000 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; | | Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik); | 4.25% | 135.380.000 | |
| | Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta | 67.690.000 | Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 103 Peserta | 67.690.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 63 Peserta x 2 kegiatan | 39.000.000 | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | Jumlah peserta yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG dan PPRG | 63 Peserta x 2 kegiatan | 39.000.000 | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 40 Peserta | 28.690.000 | | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG tingkat desa dan kelurahan | 40 Peserta | 28.690.000 | |
| | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta | 67.690.000 | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan | | Jumlah peserta pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 92 Peserta | 67.690.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|---|-----------------------------|--|--------|--|---|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | kewenangan kabupaten / kota | | | | | |
| | Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumah an | 67.690.000 | Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | | Jumlah perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan | 92 Perempuan Pekerja Rumah an | 67.690.000 | |
| | Program perlindungan perempuan | | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 37% | 105.000.000 | Program perlindungan perempuan | | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 37% | 105.000.000 | |
| | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga | 25.000.000 | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kot | | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga | 25.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|---|------------------------------|-----------------------------|---|--------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | a | | | | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 27 Peserta | 25.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 27 Peserta | 25.000.000 | |
| | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 6 Kasus | 50.000.000 | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang | | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 6 Kasus | 50.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kot a | | | | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi | 6 kasus | 50.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi | 6 kasus | 50.000.000 | |
| | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan | | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam | 7 Lembaga | 30.000.000 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia | | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam | 7 Lembaga | 30.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | | rumah tangga | | | layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | | rumah tangga | | | |
| | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 60 peserta | 30.000.000,00 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | | Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) | 60 peserta | 30.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Program peningkatan kualitas keluarga | | Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga | 72,00% | 65.000.000 | Program peningkatan kualitas keluarga | | Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga | 72,00% | 65.000.000 | |
| | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | | Jumlah keluarga yang dibina | 80 keluarga | 65.000.000 | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | | Jumlah keluarga yang dibina | 80 keluarga | 65.000.000 | |
| | Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan | | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam | 80 Peserta | 65.000.000 | Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan | | Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan | 80 Peserta | 65.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|------------------------------|-----------------------------|--|--------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | kabupaten/kota | | pengasuhan balita | | | kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota | | balita | | | |
| | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | | Persentase tersedianya data profil gender dan anak | 40% | 40.370.000 | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | | Persentase tersedianya data profil gender dan anak | 40% | 40.370.000 | |
| | Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 data | 40.370.000 | Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 34 data | 40.370.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Penyediaan data gender dan anak di kabupaten/kota | | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen | 10.037.600 | Penyediaan data gender dan anak di kabupaten/kota | | Jumlah dokumen profil gender dan profil anak yang dibuat | 2 Dokumen | 10.037.600 | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | 33 Peserta | 15.166.200 | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil anak tingkat kecamatan | 33 Peserta | 15.166.200 | |
| | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | 33 Peserta | 15.166.200 | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah profil gender tingkat kecamatan | 33 Peserta | 15.166.200 | |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | Persentase forum anak yang terbentuk | 12,66% | 133.000.000 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | Persentase forum anak yang terbentuk | 12,66% | 133.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan | 78.000.000 | Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Satuan Pendidikan | 78.000.000 | |
| | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta | 47.328.000 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan | | Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi KLA | 120 Peserta | 47.328.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | kabupaten/kota | | | | | |
| | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Peserta | 55.000.000 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak | 67 Peserta | 55.000.000 | |
| | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 18 Pembentukan | 31.793.000 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat | | Jumlah forum anak yang dibentuk/dibina | 18 Pembentukan | 31.793.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|------------------------------|-----------------------------|---|--------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | daerah kabupaten/kota | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta x 2 kegiatan | 23.207.000 | | | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti sosialisasi pelayanan kesehatan ramah anak | 35 Peserta x 2 kegiatan | 23.207.000 | |
| | Program perlindungan khusus anak | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50% | 125.000.000 | Program perlindungan khusus anak | | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 50% | 125.000.000 | |
| | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 12,35% | 20.000.000 | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kot | | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 12,35% | 20.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | a | | | | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 20 Peserta | 20.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kapasitas P2TP2A dalam memberikan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan | 20 Peserta | 20.000.000 | |
| | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota | | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 12 Kasus | 80.000.000 | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / | | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 12 Kasus | 80.000.000 | |

| Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|--|--------|---|--|-----------------------------|--|--------|--|--|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | | | kota | | | | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 12 Kasus | 55.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang didampingi | 12 Kasus | 55.000.000 | |
| | Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia | 45 peserta (unsur Siswa SMP/mts, SMA/MA) | 25.000.000,00 | Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan | | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi undang - undang penyalahgunaan NAPZA, pornografi dan pencegahan perkawinan usia anak | 45 peserta (unsur Siswa SMP/mts, SMA/MA) | 25.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|---|--|-----------------------------|---|--------|---|--|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | anak | | | kabupaten/kota | | | | | |
| | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% | 25.000.000 | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 4,22% | 25.000.000 | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang | | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis | 40 peserta relawan PATBM desa keluarahan | 25.000.000,00 | Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia | | Jumlah peserta bimbingan teknis sistem tata kelola pendampingan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. | 40 peserta relawan PATBM desa keluarahan | 25.000.000,00 | |

| Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|--------------------------------|---|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | | masyarakat. | | | layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | | | | | |
| J U M L A H | | | | | 4.455.034.800 | | | | | 4.455.034.800 | |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan sampai musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.4 T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung kebijakan nasional, adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender.
 - Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standart.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Lamongan, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai hasil representasi Visi Bupati Terpilih, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

- Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tujuan

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Sasaran

- Meningkatnya Pemberdayaan dan pendapatan Masyarakat

Indikator : Indeks pemberdayaan gender (IDG)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra Tahun 2021 - 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kerja Tahun 2023 antara lain :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
- a. **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota**
- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- b. **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota Sosialisasi**
- Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
 - a. **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
 - a. **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
 - a. **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. **Program Perlindungan Perempuan**
 - a. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kabupaten/kota
 - b. **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban Kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/Kota.
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut tabel rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangka Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|--|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | | | Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/Kota daerah | Nilai IKM Perangkat Daerah | 80 | 4.223.796.394 | DAU | 80,5 | 4.274.988.600 | SEKRETARIAT |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah | 5 Dokumen | 26.300.000 | DAU | 5 Dokumen | 26.300.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 13.000.000 | DAU | 2 Dokumen | 13.000.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 3 Laporan | 13.300.000 | DAU | 3 Laporan | 13.300.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah | 5 Laporan | 3.151.393.394 | DAU | 5 Laporan | 3.202.585.600 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 Orang/Bulan | 3.125.093.394 | DAU | 20 Orang/Bulan | 3.176.285.600 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 2 Laporan | 13.000.000 | DAU | 2 Laporan | 13.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 2 Laporan | 13.300.000 | DAU | 2 Laporan | 13.300.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik | 100% | 68.347.000 | DAU | 100% | 68.347.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|--|---|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 45 Paket | 40.847.000 | DAU | 45 Paket | 40.847.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 Orang | 27.500.000 | DAU | 10 Orang | 27.500.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi umum perangkat daerah | Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik | 100% | 136.700.000 | DAU | 100% | 136.700.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 8 Paket | 10.000.000 | DAU | 8 Paket | 10.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 6 Paket | 14.500.000 | DAU | 6 Paket | 14.500.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 10 Paket | 30.000.000 | DAU | 10 Paket | 30.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 Paket | 25.000.000 | DAU | 5 Paket | 25.000.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan | 7 Dokumen | 7.200.000 | DAU | 7 Dokumen | 7.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 10 Laporan | 50.000.000 | DAU | 10 Laporan | 50.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik | 100% | 129.300.000 | DAU | 100% | 129.300.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 22 Unit | 45.800.000 | DAU | 22 Unit | 45.800.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 12 Unit | 83.500.000 | DAU | 12 Unit | 83.500.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 606.856.000 | DAU | 100% | 606.856.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 4 Laporan | 100.000.000 | DAU | 4 Laporan | 100.000.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 Laporan | 5.000.000 | DAU | 4 Laporan | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 501.856.000 | DAU | 12 Laporan | 501.856.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik | 100% | 104.900.000 | DAU | 100% | 104.900.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 33.000.000 | DAU | 2 Unit | 33.000.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 6 Unit | 16.900.000 | DAU | 6 Unit | 16.900.000 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 5 Unit | 5.000.000 | DAU | 5 Unit | 5.000.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|--|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 1 Unit | 50.000.000 | DAU | 1 Unit | 50.000.000 | |
| URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; | Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik); | 4,50% | 205.240.400 | DAU | 4,75% | 207.727.900 | BIDANG PUG DAN PP |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota | Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG | 61 Perangkat Daerah | 68.414.400 | DAU | 61 Perangkat Daerah | 69.243.000 | BIDANG PUG DAN PP - SEKSI PUG |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten / Kota | 61 Perangkat Daerah | 68.414.400 | DAU | 61 Perangkat Daerah | 69.243.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|--|--|------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina | 13 Organisasi | 68.413.000 | DAU | 13 Organisasi | 69.242.900 | BIDANG PUG DAN PP - SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 39.456.000 | DAU | 1 Dokumen | 39.870.000 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi | Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota. | 13 Organisasi | 28.957.000 | DAU | 13 Organisasi | 29.372.900 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | 290 Lembaga | 68.413.000 | DAU | 290 Lembaga | 69.242.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas | 80 Orang | 34.207.000 | DAU | 80 Orang | 34.622.000 | HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang tersedia | 2 Dokumen | 34.206.000 | DAU | 2 Dokumen | 34.620.000 | |
| 2 | 08 | 03 | | | Program perlindungan perempuan | Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan | 39% | 311.720.700 | DAU | 41% | 315.498.700 | BIDANG PPA |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 8 Lembaga | 26.694.000 | DAU | 8 Lembaga | 26.694.000 | BIDANG PPA - SEKSI PENCEGAHAN |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 26.694.000 | DAU | 1 Dokumen | 26.694.000 | KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan | 7 Kasus | 120.608.000 | DAU | 7 Kasus | 120.608.000 | BIDANG PPA - SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | 7 Layanan | 120.608.000 | DAU | 7 Layanan | 120.608.000 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga. | 7 Lembaga | 164.418.700 | DAU | 7 Lembaga | 168.196.700 | BIDANG PPA - SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota | Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas | 400 Orang | 164.418.700 | DAU | 400 Orang | 168.196.700 | |
| 2 | 08 | 04 | | | Program peningkatan kualitas keluarga | Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga | 74% | 252.620.200 | DAU | 76% | 255.681.900 | BIDANG PUG DAN PP |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah keluarga yang dibina | 330 Keluarga | 252.620.200 | DAU | 330 Keluarga | 255.681.900 | BIDANG PUG DAN PP - SEKSI PENINGKATA N KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota | Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota | 5 Laporan | 252.620.200 | DAU | 5 Laporan | 255.681.900 | |
| 2 | 08 | 05 | | | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | Persentase tersedianya data profil gender dan anak | 60% | 223.140.400 | DAU | 70% | 225.844.900 | BIDANG PHA DAN SISDA |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak | 35 Data | 223.140.400 | DAU | 35 Data | 225.844.900 | BIDANG PHA DAN SISDA - SEKSI SISTEM DATA |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten / kota yang tersedia | 2 Dokumen | 223.140.400 | DAU | 2 Dokumen | 225.844.900 | |
| 2 | 08 | 06 | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase forum anak yang terbentuk | 14,77% | 230.805.900 | DAU | 16,88% | 233.603.200 | BIDANG PHA DAN SISDA |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak | 54 lembaga | 115.402.900 | DAU | 54 lembaga | 116.802.200 | BIDANG PHA DAN SISDA - SEKSI PENGARUSU |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota | Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha | 326 Organisasi | 115.402.900 | DAU | 326 Organisasi | 116.802.200 | TAMAAN HAK ANAK |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak | 35 Lembaga | 115.403.000 | DAU | 35 Lembaga | 116.801.000 | BIDANG PHA DAN SISDA - SEKSI PENINGKATA N KUALITAS HIDUP ANAK DAN PARTISIPASI ANAK |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 46.405.000 | DAU | 1 Dokumen | 46.871.000 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|---|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 04 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota | 2 Dokumen | 68.998.000 | DAU | 2 Dokumen | 69.930.000 | |
| 2 | 08 | 07 | | | Program perlindungan khusus anak | Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 55% | 276.030.300 | DAU | 60% | 279.375.700 | BIDANG PPA |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota | Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan | 16,67% | 27.617.000 | DAU | 16,67% | 27.617.000 | BIDANG PPA - SEKSI PENGEHA N KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 27.617.000 | DAU | 1 Dokumen | 27.617.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota | Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan | 16 Kasus | 229.281.000 | DAU | 16 Kasus | 229.281.000 | BIDANG PPA - SEKSI PERLINDUNG AN ANAK |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|-----------|----|----|------|----|---|--|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB N/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota. | Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota | 16 Layanan | 199.701.000 | DAU | 16 Layanan | 199.701.000 | BIDANG PPA - SEKSI PERLINDUNG AN ANAK |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 03 | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 29.580.000 | DAU | 1 Dokumen | 29.580.000 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota | Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 3,69% | 19.132.300 | DAU | 3,69% | 22.477.700 | |

| RKPD 2023 | | | | | | PRAKIRAAN MAJU 2024 | | | | | | |
|--------------------|----|----|------|----|--|--|------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | JUMLAH | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF | BIDANG YANG MENANGANI |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota | 1 Dokumen | 19.132.300 | DAU | 1 Dokumen | 22.477.700 | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | 5.792.720.900,00 | |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan oleh perangkat kerja sebagai usulan program dan kegiatan guna mewujudkan tercapainya pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dengan menyesuaikan program kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini merupakan bagian dari RENSTRA 2021-2026 maupun RKPd 2023 Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

5.1 Catatan Penting

Dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mengalami keterbatasan dana saat terjadinya Pandemi Covid-19. Anggaran terbatas namun kinerja dituntut lebih intens terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini perlu diperhatikan agar kedepannya Kinerja maksimal didukung dengan anggaran yang maksimal.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd), sebagai implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan renja tahun 2023

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lamongan, 28 Juli 2022

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710722 199203 2 005

